



# Buletin Parlementaria

Nomor 1012/III/VI/2018 • Juni 2018



## DPR Konsisten Peroleh Opini WTP

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN



RAPBN 2019 Ambisius dan Banyak Tantangan



## DPR Konsisten Peroleh Opini WTP

**Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI masih bisa terus konsisten untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).**

“Ke depan tentunya sesuatu yang sudah baik akan kita terus perbaiki menjadi yang lebih baik lagi. Seperti pesan Ketua DPR RI jika ada predikat yang melebihi WTP, maka Ketua DPR berkeinginan DPR ada pada predikat tersebut. Ini merupakan suatu tantangan,” ungkap Indra usai menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/

Lembaga tahun 2017 di Auditorat Keuangan Negara III Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa, (5/6/2018).

Indra mengimbau, disamping laporan pertanggung jawaban keuangan masing-masing satuan kerja yang ada di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, ada hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku yang menurutnya juga harus dicermati.

“Ada empat hal yang akan saya ingatkan kepada teman-teman di Kesetjenan DPR RI. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kedua kecukupan mengungkapkan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang terakhir efektivitas sistem pengendalian intern,” papar Indra.

Oleh karena itu, Indra menekankan akan meningkatkan dan memperketat khususnya pada sistem pengendalian intern. “Satu rupiah pun uang negara itu harus dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya semua stakeholder di lingkungan kesetjenan maupun keparlemen akan terus menerus kita sosialisasikan



**SIL PEMERIKSAAN  
AN/LEMBAGA TAHUN 2017  
UANGAN NEGARA III**

2018



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)  
**REDAKTUR**  
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske  
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,  
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,  
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,  
Azka Restu Fadillah  
**ADMINISTRASI**  
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Geraldie Opie  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

**PENERBITAN**  
**PIMPINAN PENERBITAN**  
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)  
**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)  
**FOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen  
**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito  
**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,  
**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)  
**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna  
**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**  
**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

penggunaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.  
Pada kesempatan yang sama, Anggota BPK RI Achsanul Qosasi memberikan apresiasi terhadap sejumlah Laporan Keuangan dari Kementerian/Lembaga yang sudah lebih bagus dibandingkan tahun kemarin.  
“Untuk itu ke depan saya menekankan kepada teman-teman di Kementerian/Lembaga agar betul-betul menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Karena bagi BPK, rekomendasi merupakan sebuah ‘mahkota’, dan rekomendasi tersebut harus diselesaikan dalam waktu 60 hari,” ungkapnya.  
Dirinya juga mengingatkan bahwa BPK membuka pintu seluas-seluasnya untuk berdiskusi dan menyelesaikan seluruh temuan yang ada demi kebaikan di Kementerian/Lembaga ke depannya.

“Temuan-temuan itu pasti bermanfaat bagi Ketua Lembaga serta para Menteri untuk menjadi koreksi ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Dan juga mandat negara yang sudah diberikan pada BPK dalam memeriksa pertanggungjawaban dan pengelolaan terhadap keuangan negara dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.  
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dihadiri oleh 38 entitas yang merupakan objek pemeriksaan untuk lingkungan Auditorat Keuangan Negara III. 38 entitas tersebut diantaranya terdiri dari 13 Kementerian dan 25 Lembaga. Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh 220 orang Tim Auditorat BPK RI yang dimulai sejak tanggal 29 Januari sampai 24 Mei 2018. ■ tra/sc



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan kuliah umum pada Sespimen Polri Dikreg ke-58 TA 2018, di Bandung, Jawa Barat

Foto: Jayadi/hr

## DPR Berharap Polri Tingkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan salah satu tugas utama Polri adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Untuk mewujudkan Harkamtibmas di seluruh wilayah NKRI, DPR RI dan Polri harus selalu meningkatkan strategi kerjasama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Sehingga, dapat mencapai tujuan pemeliharaan ketertiban masyarakat dan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.**

“Sebagai orang yang pernah memimpin Komisi III DPR RI, dimana Polri menjadi salah satu mitra kerjanya, saya merasakan betul kerja sama antara DPR RI dengan Polri selama ini terus terjalin dengan baik. DPR dalam melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat banyak mendapatkan dukungan dari Polri, sebaliknya Polri dalam menjalankan fungsinya juga diawasi dan mendapatkan dukungan dari DPR,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya, saat memberikan kuliah umum tentang ‘Strategi Kerja Sama Legislatif dan Polri dalam Harkamtibnas’, pada Sespimen Polri Dikreg ke-58 TA 2018, di Bandung,

Jawa Barat, Kamis (7/6/2018).

Bamsoet menjelaskan, selama ini sinergisitas DPR dan Polri telah berjalan baik. Dalam fungsi legislasi, DPR berupaya menyusun dan mengundang RUU yang mempermudah Polri dalam menjalankan tugasnya.

“Sebagai contoh bisa dilihat pada perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan pada 25 Mei 2018 lalu. UU ini telah membawa perubahan bagi penegakan hukum atas upaya penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia. Khususnya, bagi Polri dengan adanya penambahan waktu yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan penyelidikan,” kata Bamsoet.

Selain itu, lanjut Bamsoet, DPR juga memasukan RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Usulan perubahan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pelaksanaan fungsi Polri di lapangan masih menghadapi banyak hambatan dan masalah.

**Bamsoet juga berharap DPR senantiasa memantau setiap kegiatan Polri, Khususnya, dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban masyarakat.**

“Terutama dari sisi kemampuan dan kualitas SDM, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, aspek transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Tujuannya, agar terwujud citra dan kinerja Polri lebih baik lagi,” terang Bamsoet.

Bamsoet juga berharap DPR senantiasa memantau setiap kegiatan Polri, Khususnya, dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban masyarakat. “Sebagai contoh, isu miras oplosan yang akhir-akhir ini mencemaskan masyarakat. DPR mendorong Kepolisian dan BPOM untuk mengawasi penjualan minuman maupun bahan-bahan campuran yang biasa digunakan dalam miras oplosan. Selain itu, DPR meminta Polri menindak tegas pelaku pengoplos, penjual, dan pemakai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” papar Bamsoet. ■ jay/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Foto : Jayadi/hari

## Ketua DPR Dukung Kenaikan Tunjangan Babinsa

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi serta mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Terlebih, Babinsa merupakan bagian dari aparat hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga pelosok desa. Kenaikan tersebut menjadi bukti Panglima TNI yang baru berhasil memperjuangkan aspirasi para prajuritnya.**

“Selama ini saat berkunjung ke daerah, saya kerap mendapatkan aspirasi dari Babinsa bahwa uang yang diterima masih belum cukup, karena harus keliling menyapa masyarakat. DPR mendukung penuh kenaikan tunjangan Babinsa yang dilakukan pemerintah. Bagaimanapun kesejahteraan para prajurit harus diperhatikan,” ujar Bamsoet saat menghadiri acara buka puasa bersama di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (05/6/18).

Selain dihadiri Panglima TNI Hadi Tjahjanto, momentum buka puasa bersama ini juga hadir Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian. Bamsoet menuturkan Babinsa merupakan ujung tombak aparat penegak hukum di daerah atau pedesaan. Keberadaan Babinsa memegang peran penting untuk mendeteksi serta mencegah sedini mungkin potensi terjadinya gangguan keamanan.

“Babinsa, Babinkamtibmas serta kepala desa merupakan tiga pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa. Tugas mereka tidak ringan karena harus terus keliling memantau masyarakat dan tamu yang datang ke wilayah mereka,” tutur Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan potensi gangguan keamanan masih cukup tinggi. Terlebih mendekati Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Karenanya, sinergisitas antara TNI dan Polri harus terus ditingkatkan. ■ eko/sc



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Lebanon.

Foto : Runi/hari

## DPR Dukung Peningkatan Kerja Sama Indonesia - Lebanon

**Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Lebanon. Hal tersebut diungkapkannya usai menerima kunjungan Duta Besar Lebanon untuk Indonesia yang baru, Mona El Tannir di ruang kerjanya, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/6/2018).**

“ Saya baru saja menerima kedatangan Dubes Lebanon untuk Indonesia yang baru lima bulan terpilih, Mona El Tannir. Beliau sedang menjajaki peningkatan hubungan kerja sama antara negaranya yakni Lebanon dan Indonesia, termasuk antar Parlemen. Tidak hanya itu, Mona juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap budaya dan kebiasaan Indonesia saat bulan suci

Ramadan dan hari raya Idul Fitri,” ungkap Fadli.

Dilanjutkan Fadli, Lebanon saat ini menjadi salah satu negara yang cukup penting di Timur Tengah, apalagi dalam krisis di Palestina. Keberadaan Lebanon tentu untuk ikut membantu terjadinya *balance of power* atau keseimbangan kekuatan.

Dan sebagaimana diketahui, sejak

lama Indonesia menjadi salah satu Negara yang aktif mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). UNIFIL ini memastikan gerak mundur Israel dari Lebanon, mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional dan membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritas efektifitasnya di area tersebut.

Pada kesempatan itu Fadli juga mengungkapkan rencana kunjungan DPR RI mendatang ke Lebanon. Salah satunya untuk meninjau sekitar 1500 pasukan UNIFIL asal Indonesia yang tengah bertugas di negara tersebut. ■ ayu/sf



# Indonesia Siap Selenggarakan Asian Games 2018

**Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyampaikan kepada Menteri Olahraga Kazakhstan, bahwa Indonesia siap mengadakan Asian Games pada bulan Agustus 2018 mendatang.**

“ Kita laporkan bahwa *venue* sudah siap dan kita akan menyambut perayaan Asian Games serta berusaha menjadi tuan rumah yang baik,” ujar Utut kepada Parlementaria, usai pertemuan dengan Menteri Olahraga Kazakhstan di Astana, Kazakhstan, baru-baru ini.

Dalam pertemuan tertutup dengan jajaran Kementerian Olahraga Kazakhstan itu, Utut mengatakan, Kazakhstan akan

mengirimkan delegasi dalam jumlah besar, sebanyak 700 orang untuk berpartisipasi dalam Asian Games di Jakarta dan Palembang.

“Kazakhstan juga melaporkan bahwa mereka akan mengirimkan tim bulutangkisnya untuk belajar ke Indonesia sebagai bentuk *best practice* mereka,” papar politisi PDI Perjuangan itu.

Utut menambahkan, sebagai bentuk kerja sama di sektor olahraga, dirinya

akan mengirimkan pemain catur dan atletik untuk belajar di Kazakhstan.

Dubes Indonesia untuk Kazakhstan Rahmat Pramono mengatakan, pertemuan dengan Kementerian Olahraga Kazakhstan berlangsung hangat dan antusias, dan pada prinsipnya mereka menyatakan kesiapannya dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama di bidang olahraga.

“Karena kerja sama di bidang olahraga merupakan kunci dalam meningkatkan hubungan bilateral tanpa harus dipolitisasi,” ujar Rahmat.

Kunjungan muhibah Wakil Ketua DPR Utut Adianto ke Kazakhstan itu diikuti sejumlah Anggota DPR RI dari berbagai fraksi, diantaranya Alex Indra Lukman (F-PDI Perjuangan), Sudin (F-PDI Perjuangan), Arif Wibowo (F-PDI Perjuangan), Irene Yusiana Roba Putri (F-PDI Perjuangan), Robert Joppy Kardinal (F-PG), Nuroji (F-Gerindra), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura). ■ si/sf



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto

Foto : Sugeng/hari



Foto: Ojji/hari

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

## Pemerintah Diminta Waspada Besaran Utang BUMN

**Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah agar mewaspada dampak dari besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut sudah menembus di atas Rp4.800 triliun. Besaran utang ini bisa berdampak serius dan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**

“Upaya pemerintah yang memisahkan utang negara dengan utang BUMN memang untuk mengecilkan beban utang negara. Tapi, jika utang BUMN itu gagal bayar, tentu akan menjadi beban negara yang harus mengambil dari APBN,” kata Taufik ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Parlemen, Kamis (7/6/2018).

Taufik menilai, upaya pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur melalui utang, lama-kelamaan akan menjadi bom waktu bagi APBN. Apalagi, sebagian besar merupakan utang jangka pendek. Sehingga BUMN harus dipacu untuk mengembalikan utangnya.

“Di tengah kondisi global yang menuju keseimbangan baru ini, pemerintah harus hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Karena dampaknya juga ke ekonomi domestik. Seperti misalnya kurs rupiah yang melemah. Jika semakin melemah, BUMN akan semakin berdarah-darah dalam kaitan mengembalikan utangnya,” tandas politisi PAN itu.

Sebagai gambaran, saat ini total utang BUMN mencapai Rp4.825 triliun, atau naik Rp1.337 triliun dibandingkan catatan utang tahun 2014 yang sebesar Rp3.488 triliun. Bahkan dalam kondisi seperti ini, Kementerian BUMN masih menargetkan untuk menambah utang hingga Rp5.253 triliun sepanjang tahun ini. ■ sf



Dalam pertemuan ini, pokok pembicaraan kami lebih menitikberatkan pada masalah hubungan kerja sama antara Indonesia dan Meksiko. Dalam hubungan dagang, nilainya juga sudah sangat baik yakni 1,2 miliar dollar. Dan kebetulan di sisi kita mengalami surplus. Tetapi ini masih bisa lebih ditingkatkan lagi,” ucap Utut usai menerima kunjungan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Armando G. Alvarez di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Dalam pertemuan tersebut, Utut menyampaikan bahwa Indonesia ingin belajar mengenai masalah sektor pariwisata dari Meksiko. “Kita tahu mereka (Meksiko) punya Acapulco, Los Cabos, Kankun yang jauh lebih maju. Saya



Foto: Azka/hari

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan Duta Besar Meksiko

## Kerja Sama Indonesia Meksiko Lebih Ditingkatkan

**Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto berharap hubungan kerja sama dua negara antara Indonesia dan Meksiko yang sudah terjalin dengan baik dapat lebih ditingkatkan lagi. Utut juga mendorong agar Presiden Jokowi beserta Menteri Pariwisata dapat melakukan kunjungan ke Meksiko guna mempererat hubungan antar kedua negara.**

berharap Presiden Jokowi beserta Menteri Pariwisata dapat berkunjung ke Mexico guna membangun hubungan yang lebih erat lagi antara kedua negara,” terangnya.

Ia juga mengharapkan agar beberapa atlet tinju nasional bisa dilatih di Meksiko, mengingat Meksiko juga sangat kuat di

cabang olahraga *boxing*. “Saya sendiri sebagai Ketua Umum Percasi berjanji akan mengundang atlet catur mereka untuk bertanding di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Dubes Meksiko Armando G. Alvarez mengungkapkan, bahwa hubungan antara Indonesia dan Meksiko

sangatlah erat, meskipun letaknya sangat berjauhan. “Tahun ini hubungan Indonesia dan Meksiko sudah terjalin selama 65 tahun, akan sangat menyenangkan apabila kita bisa meningkatkan kerja sama, baik ekonomi, hukum, keamanan, dan bidang yang lainnya,” ucap Armando. ■ dep/sc

# Legislator Nilai Rincian Anggaran Lemhannas dan Wantannas Terlalu Kuno

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengaku sangat miris melihat ketimpangan yang terjadi pada Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas). Ia mengaku kaget melihat jumlah anggaran dua lembaga tersebut yang sangat kecil dan berbeda jauh dengan mitra-mitra kerja Komisi I lainnya.



Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty

Lemhannas diharapkan berani untuk maju sebagai lembaga yang dapat memperbaiki mentalitas karakter bangsa. Tentunya hal ini harus didorong dengan anggaran yang jelas dan efektif," tandas politisi dapil Jawa Tengah itu. ■ eps/sf

“Setiap orang kalau menjadi alumni pendidikan Lemhannas itu punya suatu kebanggaan, kalau mau jadi pimpinan harus sekolah Lemhannas dulu kan begitu. Tetapi kalau kita lihat anggarannya, itu tidak sepadan. Tidak sesuai,” ujarnya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lemhannas dan Wantannas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai permintaan anggaran yang diajukan Lemhannas sangat konvensional dan sangat kecil. Jika hal ini dilanjutkan, maka Evita meyakini kemungkinan besar hanya menghambat program-program yang akan dijalankan oleh kedua lembaga tersebut.

“Sangat kuno sekali. Anggaran yang diminta oleh Lemhannas contohnya

hanya minta untuk perbaikan gedung atau perbaikan perangkat komputer yang sudah tua, ini kuno banget. Bandingkan dengan lembaga lain yang sudah meminta anggaran triliunan rupiah untuk pengadaan teknologi yang canggih,” tambahnya.

Padahal Indonesia sedang menghadapi ancaman yang sangat serius terkait mentalitas bangsa. Dasar materi dari revolusi mental itu berada di lembaga ini. Pada akhirnya kemudian posisi Lemhannas menjadi sangat dipertanyakan karena seharusnya mereka berperan aktif dalam menjaga dan membangun karakter nasionalisme bangsa yang saat ini mulai pudar.

“Dengan persoalan-persoalan mentalitas bangsa yang ada saat ini,

## Zainudin Amali: Peraturan Bawaslu Harus Mengacu PKPU

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengingatkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Kalau KPU membuat rumusan A maka Bawaslu harus membuat peraturan berdasarkan PKPU itu,” ungkap Zainudin Amali saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bawaslu, KPU dan Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6).

Dijelaskan Zainudin Amali, saat membahas perbawaslu ada perbedaan pendapat antara Komisioner KPU dengan Bawaslu terkait peraturan tentang pengawasan kampanye khususnya mengenai citra diri.

Dalam rapat, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan peserta pileg adalah partai politik yang telah ditetapkan nomor urutnya. Menurutnya logo parpol ada



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

sejak parpol lahir, sedangkan nomor urut ditetapkan hanya ketika mengikuti sirkulasi pemilu 5 tahun sekali.

“Logo parpol tanpa nomor urut bukan peserta pileg. Sebab itu citra diri adalah logo dan nomor urut,” katanya

Kontras dengan KPU, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebut bahwa citra diri mencakup logo dan nomor urut parpol. Logo, kata dia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik, sedangkan ketika parpol sudah menjadi peserta pileg tunduk pada UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Kami tetap berpendapat definisi kampanye kembali ke Pasal 1 ayat 35 UU 7/2017 yang mendefinisikan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu,” jelasnya.

Peraturan ini bertujuan agar tidak ada yang melakukan kampanye di luar jadwal. Namun, ketidaksepakatan antara KPU, Komisi II dan Bawaslu membuat pembahasan menjadi cukup alot. Hingga akhirnya Komisi II meminta Rancangan Perbawaslu mesti diubah selaras dengan PKPU. ■ rmm/sc



# Polri Harus Bendung Radikalisme Kampus

**Kepolisian Republik Indonesia diimbau mampu membendung radikalisme yang muncul dari kaum intelektual kampus. Ini sangat berbahaya, karena bisa meracuni masyarakat luas. Polri perlu membangun kerja sama yang baik dengan alim ulama dan tokoh masyarakat untuk membendung radikalisme kampus tersebut.**

**A**nggota Komisi III DPR RI John Kenedy Aziz menyampaikan hal ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, usai mengikuti rapat kerja dengan Kapolri, Selasa (5/6). Ia tak menampik memang ada radikalisme yang muncul dari kampus-kampus. Dan itu lebih berbahaya daripada radikalisme yang muncul dari kampung-kampung.

“Memang ada radikalisme yang muncul dari kampus. Padahal, kampus itu sesungguhnya tempat belajar para akademisi. Jangan racuni para mahasiswa dengan kegiatan di luar kegiatan belajar. Saya cukup prihatin atas fenomena radikalisme kampus. Ini tugas Kepolisian



Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Aziz

bagaimana caranya agar radikalisme jangan sampai berkembang dan mewabah ke masyarakat. Kalau radikalisme lari ke politik dan ideologi negara, maka itu sudah menyimpang dari tujuan kampus,” papar John.

Kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait jadi keniscayaan bagi Polri. Bagaimana pun peran masyarakat dan ulama sangat penting untuk membantu membendung radikalisme. “Saya sendiri saat berada di dapil, selalu menyampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan paham radikal yang berkembang, sehingga menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat,” aku Politisi Partai Golkar ini.

Apa yang terjadi di Surabaya, Jatim, sambung John, jadi pembelajaran yang berharga bagi semua pihak. Ia mengaku tak habis pikir, bagaimana seorang ibu teganya mengajak buah hatinya untuk bunuh diri sekaligus membunuh banyak orang. “Biasanya seorang ibu memberi kasih sayang. Saya tidak tahu bagaimana pihak-pihak tertentu mencuci otak, sehingga kebaikan hilang dari pikirannya,” tutup John. ■ mh/sc



Anggota Komisi III Wihadi Wiyono

# Polri Layak Mendapat Tambahan Anggaran

**Polri sangat layak mendapat tambahan anggaran dari besaran pagu indikatif yang diajukan ke Komisi III DPR RI. Dari pagu indikatif yang disampaikan Kapolri, ada alokasi anggaran sebesar Rp76,9 triliun. Dan tambahan yang diminta Kapolri sebesar Rp44,4 triliun.**

kerjanya yang berat, apalagi memasuki tahun politik seperti sekarang.

“Apa yang dibutuhkan Polri harus kita dukung, karena Polri membutuhkan biaya banyak untuk penanganan kejahatan, baik terorisme, narkoba, maupun kejahatan lainnya,” ujar Wihadi. Apa

yang disampaikan Kapolri ini masih pagu indikatif yang membutuhkan pembahasan lebih dalam. Tambahan anggaran itu, kata Wihadi, sudah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

“Saya kira Polri masih membutuhkan biaya yang besar. Fasilitas Polri masih minim, peralatan Polri masih minim, kesejahteraan anggota Polri juga belum sesuai dengan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini semua perlu peningkatan. Komisi III sebagai mitranya, melihat Polri layak mendapatkan penambahan anggaran itu,” tutup Politisi Partai Gerindra tersebut. ■ mh/sc

**Saya kira Polri masih membutuhkan biaya yang besar. Fasilitas Polri masih minim, peralatan Polri masih minim, kesejahteraan anggota Polri juga belum sesuai dengan yang menjadi tanggung jawabnya.**

**D**emikian terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Tito Karnavian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6). Anggota Komisi III Wihadi Wiyono saat dimintai komentarnya menyatakan, memang sangat layak bagi Polri mendapat tambahan anggaran itu, karena beban



Tim Kunker Komisi V DPR meninjau kesiapan Bandara Internasional Minangkabau jelang mudik lebaran tahun 2018, di Padang, Sumbar

Foto: Suci/jk

# Bandara Internasional Minangkabau Siap Hadapi Lonjakan Penumpang

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi V Anton Sukartono Suratno menyatakan Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Sumatera Barat siap hadapi lonjakan penumpang mudik Lebaran Tahun 2018.**

Bandara Internasional Minangkabau siap menampung lonjakan penumpang mudik Lebaran Tahun 2018. Lonjakan itu sudah diperkirakan berapa orang yang akan hadir. Menurut keterangan Otoritas Bandara Internasional Minangkabau, insyaallah siap," papar Anton usai melakukan peninjauan kesiapan angkutan dan sarana prasarana menghadapi Lebaran Tahun 2018 di Padang, Sumbar, Kamis (07/6/2018)

Terkait kenaikan harga ticket pesawat yang selalu terjadi di hari-hari libur panjang dan lebaran ini, Anton menjelaskan, menurut keterangan Otoritas Bandara Internasional Minangkabau sudah ditentukan batas bawah dan batas atas dari penerapan harga ticket pesawat.

"Kami sudah pastikan dan masyarakat juga harus tahu berapa batas atasnya.

Misalnya tadi dari Jakarta ke Padang sekarang menjadi Rp2.100.000. Itu sudah pada batas atasnya, jadi kalau lebih dari itu untuk komisi travel, misalnya Rp2.500.000 saya rasa masih wajar. Kalau lebih dari itu harus dilaporkan kepada otoritas bandara," mantapnya.

Walaupun demikian terkait kesiapan angkutan lebaran, sambung Politisi Demokrat ini, dari pihak PT. Angkasa Pura II mengaku masih ada sedikit kendala masalah *runway* dan *taxiway* yang masih ada sepertiga lagi yang kurang. Tapi kalau pesawat besar type 330 sudah bisa mendarat. "Untuk ini sudah dianggarkan dan insyaallah 2019 bisa di pakai," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menginformasikan bahwa kereta bandara yang baru diresmikan Presiden

Joko Widodo pada 1 Mei lalu, dari Stasiun Kereta Api Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau, siap menghadapi lonjakan penumpang dalam lebaran tahun ini.

"Untuk kereta bandara tadi kami sudah cek, siap alhamdulillah *on time*. Dan berdasarkan keterangan masyarakat yang tadi kami temui, mereka menyatakan senang, kereta ini terbilang murah hanya 10,000 rupiah dari Kota Padang ke bandara dan kereta ini ber AC," jelasnya.

Demikian pula dengan infrastruktur jalan di Kota Padang, ia menilai sudah bagus. "Sepanjang jalan yang kami tinjau sudah sangat bagus dan rapih. "Tadi kami mendapat informasi dari Dirlantas Polda Padang, bahwa pasar tumpah di Koto Baru yang menjadi sumber kemacetan karena banyak pedagang yang berdagang di bahu jalan dan banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan, kini pasar tersebut menjadi rapih dan arus lalulintas lancar tidak macet lagi," apresiasinya.

Legislator daerah pemilihan Jawa Barat V ini memberikan apresiasi kepada Dirlantas Polda Padang Singgamata yang berhasil menyelesaikan masalah kemacetan di jalur Padang – Pekanbaru tersebut. "Dirlantas yang baru Bapak Singgamata beliau bekerjasama dengan Gubernur, Bupati dan Tokoh Masyarakat memberikan solusi dengan menyediakan parkir khusus dan memindahkan para pedagang kaki lima," katanya.

Dalam kunjungan meninjau kesiapan angkutan lebaran tersebut, Tim Komisi V juga meninjau Pelabuhan Teluk Bayur yang saat ini peruntukannya untuk logistik (barang). Ia menyayangkan kalau pelabuhan yang berdiri tahun 1888 ini tidak dioptimalkan peruntukannya.

"Pelabuhan Teluk Bayur sekarang ditentukan untuk angkutan logistik. Pelabuhan ini berdiri tahun 1888 itu dan pernah menjadi pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini sangat indah, sangat bagus dan berada di teluk, pelabuhannya alami sangat disayangkan kalau tidak dioptimalkan. Saat ini logistik sudah sangat primadona dimana *shipping* sudah mencapai 2,5 juta akan ditingkatkan menjadi 5 juta lagi. Kami mohon pada semua *stakeholder* di sana untuk bias mencapainya," jelasnya. ■ sc



Foto: Iwan

Tim Kunker Komisi V DPR meninjau Bandar Udara Haluoleo terkait persiapan jelang mudik Lebaran tahun 2018 di Sultra

## Komisi V Soroti Pembangunan Bendungan Pelosika

**Komisi V DPR RI menyoroti pembangunan Bendungan Pelosika di Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang kabarnya telah dicoret dari 14 proyek infrastruktur dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Joko Widodo.**

Pembangunan bendungan ini menjadi perhatian Komisi V DPR RI, karena proyek bendungan ini sangat didambakan masyarakat Sultra. Bahkan bila pembangunan ini direalisasikan akan meningkatkan produksi pertanian rakyat Sultra.

Hal itu terungkap saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sultra dan Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di ruang rapat Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Jum'at (8/5/2018).

"Komisi V sangat kaget dengan informasi bahwa pemerintah mencoret proyek pembangunan Bendungan Pelosika. Dengan alasan proyek strategis nasional tersebut hingga saat ini belum ada investor yang tertarik berinvestasi," ungkap Ibnu.

Politisi Partai Golkar itu juga mempertanyakan apakah proyek ini ditunda atau dibatalkan. Karena tidak adanya informasi detail mengenai hal ini, sehingga memunculkan kesimpangsiuran informasi di publik.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan, pembangunan Bendungan Pelosika

dipastikan akan tetap dilanjutkan. Tahun ini sedang dilakukan review desain dan dilanjutkan dengan pekerjaan fisik pada tahun 2019 mendatang.

"Kami tegaskan bahwa pembangunan Bendungan Pelosika tetap dikerjakan, tidak di-*pending*. Bendungan ini termasuk besar dengan kapasitas 800 juta meter kubik," ujar Ni Made Sumiarsih.

Bendungan Pelosika direncanakan bermanfaat sebagai pengendali banjir yang dapat mengurangi debit air genangan sebesar 53,20 persen, sebagai penyedia air irigasi untuk Daerah Irigasi seluas 23.000 Ha, penyedia air baku dengan debit sebesar 750 liter/ detik, sebagai PLTA dengan kapasitas 2 x 10,5 MW, sebagai tempat wisata dan sarana olahraga air. ■ iw/sf



Foto: Azka/JK

Tim Kunker Komisi V DPR meninjau persiapan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni jelang mudik lebaran 2018

## Komisi V Apresiasi Kesiapan ASDP Hadapi Mudik Lebaran 2018

**Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo yang juga Ketua Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Banten dan Provinsi Lampung mengapresiasi langkah PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak yang telah menyiapkan 58 kapal dari total 70 kapal, untuk mudik Lebaran 2018.**

Sigit menambahkan, dari hasil peninjauan, ASDP Merak telah menyiapkan 6 dermaga dan mempercepat jam keberangkatan untuk menghindari penumpukan kendaraan pemudik di pelabuhan, guna menghadapi 4,2 juta pemudik tahun ini, yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak di Banten dan Pelabuhan Bakauheni di Lampung.

“Tadi disampaikan bahwa pihak ASDP Merak sudah siap untuk menghadapi libur Lebaran tahun ini dengan 58 kapal yang sudah memenuhi standar operasional. Untuk mengurangi penumpukan kendaraan di pelabuhan,

pihak ASDP juga sudah menyiapkan 6 dermaga dan mempercepat waktu keberangkatan,” jelas Sigit di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (7/6).

Pihak ASDP Merak juga sudah menambahkan pintu khusus kendaraan roda dua masuk ke dermaga, dan juga memasang tenda untuk parkir kendaraan roda dua di pelabuhan. ASDP memperkirakan 20.000 unit motor akan memenuhi pelabuhan pada H-3 dan H-2 lebaran.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, agar di tahun depan ada penambahan satu dermaga agar bisa lebih mengatasi penumpukan penumpang.

“Mudah-mudahan di tahun depan ada

penambahan satu dermaga untuk kapal yang menyeberang. Sehingga jumlah kapal yang berangkat semakin banyak. Dan juga fasilitas yang ada di kapal harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM),” imbuh Sigit.

Kunjungan Kerja ke Banten dan Lampung ini dalam rangka peninjauan persiapan sarana dan prasarana transportasi mudik Lebaran tahun 2018. Komisi V ingin memastikan semua pelayanan sudah siap dan tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi selama masa mudik Lebaran 2018 ini.

Kunker ini juga diikuti Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis (F-Gerindra) dan sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, diantaranya Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra), Sadarrestuwati (F-PDI Perjuangan), Rahmat Nasution Hamka (F-PDI Perjuangan), Willem Wandik (F-PD), Hartanto Edhie Wibowo (F-PD), Bakri Hm (F-PAN), Neng Eem Marhamah (F-PKB), Nurhasan Zaidi (F-PPS), Wardatul Asriah (F-PPP), Sahat Silaban (F-NasDem).

Tim Komisi V DPR RI juga didampingi oleh Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, Direktur Operasi Basarnas Bambang Suryo Aji, dan beberapa mitra kerja terkait. ■ azk/sf

# Ketersediaan BBM dan Suplai Listrik di Sulawesi Dipastikan Aman

**Komisi VII DPR RI memastikan aman ketersediaan semua jenis BBM di Marketing Operation Region VII Makasar, Sulawesi Selatan dan supply energi listrik dalam menghadapi hari raya Idul Fitri dan pasca Idul Fitri.**

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII Mukhtar Tompo di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR dengan Direksi PT. Pertamina (Persero) dan Direksi PT. PLN (Persero) di Terminal BBM MOR VII Makasar, Sulawesi Selatan, Senin (4/6)

“Kami tadi menanyakan secara spesifik, sangat gamblang dan dipastikan tidak ada masalah karena sudah diantisipasi secara sistem supply dari Pertamina pusat ke seluruh MOR. Terutama di MOR VII ini, itu dianggap tidak ada masalah karena persoalan-persoalan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sudah dievaluasi dan dijadikan bahan untuk mencari solusi pada lebaran kali ini,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Politisi Hanura ini menjelaskan, data mudik lebaran baik yang menggunakan kapal laut yang difasilitasi oleh Pertamina maupun yang menggunakan

jalur transportasi menggunakan bahan bakar jenis avtur, semuanya sudah dihitung oleh Pertamina dan pasokannya dipastikan aman untuk menghadapi lebaran dan pasca lebaran. Pertamina sudah mengantisipasi semua, termasuk ketersediaan LPG 3 kg.

“Tadi sempat saya menanyakan bagaimana mengantisipasi seandainya

**Bilamana ada hal-hal yang teknis dan tidak linier dengan penjelasan yang disampaikan PLN, maka saya akan melakukan komunikasi secara intensif untuk mencari solusi atas persoalan yang mungkin akan terjadi, tapi kita berharap semoga apa yang dipaparkan ini sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan**

misalnya ada agen-agen yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan LPG 3 kg, rupanya Pertamina sudah memiliki sistem sendiri untuk membantu keberadaan agen yang mungkin belum merata di setiap kabupaten/kota terutama di kecamatan-kecamatan dan desa-desa. jadi agen-agensya sudah ada pangkalan,” ungkapnya.

Namun, jika ada hal-hal yang sangat teknis yang membutuhkan penanganan khusus, maka Pertamina sudah menyiapkan armada khusus untuk langsung menyasar ke lokasi atau objek terkait. “Saya sudah coba dua kali, salah satunya yang ada di Mamuju Utara dan itu betul saya telepon hari ini dan besok langsung diselesaikan,” imbuhnya.

Dalam kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung tersebut, ia juga memastikan pasokan listrik wilayah Sulawesi aman. Menurutnya, dari data PLN berdasarkan jaringan yang ada dan ketersediaan supply energi listrik dipastikan untuk wilayah Sulawesi aman terutama yang mengalami surplus itu Sulawesi bagian selatan. “Jadi untuk Kota Makasar secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum itu dianggap tidak ada masalah sampai pasca lebaran,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dari presentasi yang disampaikan GM PLN, ia menilai data yang disampaikan cukup akurat tinggal realisasinya nanti. “Saya sebagai Anggota Komisi VII Dapil Sulawesi Selatan pasti akan lebih *concern* lagi, bilamana ada hal-hal yang teknis dan tidak linier dengan penjelasan yang disampaikan PLN, maka saya akan melakukan komunikasi secara intensif untuk mencari solusi atas persoalan yang mungkin akan terjadi, tapi kita berharap semoga apa yang dipaparkan ini sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi segala kemungkinan keadaan darurat, PLN sudah menyiapkan beberapa genset. “Kalau sekiranya ada trafo yang terbakar atau entah ada yang disfungsi sekiranya tiba-tiba, PLN sudah punya perangkat otomatis untuk mengantisipasi itu,” tutupnya. ■ sc



Anggota Komisi VII Mukhtar Tompo

Foto: Suci/hr



Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus

Foto: Andri/hr

## Komisi VI Minta Penyerapan Anggaran Kementerian BUMN Lebih Maksimal

**Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus menyampaikan, rencana anggaran tahun 2019 dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2018 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus lebih maksimal lagi, walaupun penyerapan anggaran Kementerian BUMN saat ini sedang dalam posisi yang sesuai.**

**D**emikian diungkapkan Ihsan di sela-sela rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6). Raker ini juga dihadiri juga oleh seluruh Deputi Kementerian BUMN.

“Dari penyerapannya, kami berharap bisa lebih maksimal lagi, karena ini sudah masuk Bulan Juni. Walaupun berada dalam

posisi sesuai, jalur penyerapannya sendiri baru di Rp247 miliar, sementara untuk 2019 kita bisa memahami pagu indikatif sebesar Rp222 miliar, memang lebih kecil dari tahun lalu, karena melihat keadaan keuangan negara saat ini,” jelas Ihsan.

Ia mengatakan Komisi VI sedang berusaha adanya penambahan anggaran dari pagu indikatif 2019 yang diusulkan oleh Kementerian BUMN, dalam rangka memaksimalkan dan merealisasikan tujuan

## Besaran Anggaran Ristek dan Dikti Masih Timpang

**Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwasanya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) 2019 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi walaupun mengalami kenaikan, tetapi masih saja timpang. Khususnya untuk anggaran Riset dan Teknologi (Ristek) dibandingkan Pendidikan Tinggi (Dikti).**



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron

Foto: Kresno/hr

“ Mengenai anggaran 2019, saya lihat tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk Ristek ada kenaikan dari Rp890 miliar sekarang menjadi Rp1,05 triliun. Tetapi bila dibandingkan dengan anggaran Pendidikan Tinggi yang mencapai Rp40 triliun, dana Ristek seperti tidak berarti apa-apa,” kata Herman saat Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa kenaikan ini juga tidak signifikan untuk mendorong terjadinya akselerasi inovasi dibidang teknologi. Artinya dimana pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap masa depan negeri dalam penguasaan teknologi kalau anggaran risetnya sangat kecil.

“Anggaran riset tersebut tidak memadai untuk bisa menghasilkan riset-riset inovatif. Contohnya saja kami saat melaksanakan kunjungan lapangan, kami hanya sampai bagaimana melakukan uji coba teknologi. Tetapi idak sampai melakukan inovasi lebih besar lagi



utama dibuatnya BUMN. Sehingga hal ini bisa diperjuangkan di Badan Anggaran, karena tugas dan fungsi Kementerian BUMN sangat berat untuk mengawasi 117 BUMN, belum termasuk anak perusahaannya.

“Kita akan membahas lagi dan memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp74 miliar jadi pagu indikatif sebesar Rp222 miliar ditambah Rp74 miliar, kurang lebih hampir Rp300 miliar bisa terwujud,” papar politisi PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, ia menyoroti garam industri impor yang berpotensi merembes ke pasar garam konsumsi. Menurutnya, selama masih ada perbedaan harga pasti ada celah untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan orang lain.

“Salah satunya adalah ada perbedaan harga dari garam industri yang memang murah di luar negeri, kemudian di impor ke dalam. Kalau dibandingkan harga garam konsumsi yang buatan Indonesia, itu jauh berbeda. Maka dari itu, Kementerian terkait harus serius dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada rembesan dari garam industri karena ini mematikan industri kita,” pesan politisi dapil Jambi itu. ■ **tn/sf**

dan lebih luas dan tentu bisa lebih bermanfaat,” tambah Herman.

Catatan paling penting yang diberikan Herman di dalam perspektif anggaran berjalan dan anggaran 2019, adalah bagaimana pemerintah seharusnya mendorong agar inovasi riset semakin meningkat. Dan tentu tidak mengurangi anggaran pendidikan.

Herman membandingkan juga membandingkan kemajuan riset dan teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan. “Jika nanti tahun 2045 penguasaan teknologi Indonesia akan sama dengan di Korea Selatan tahun 2015. Jadi peradaban teknologi kita maju ke depan, namun perbandingan kita mundur ke belakang,” tegasnya.

“Ini tentu menjadi catatan kita, mudah mudahan Pak Jokowi sebagai Presiden selalu mengedepankan akselerasi riset dan teknologi yang tercermin dalam bentuk anggaran,” tutup politisi dapil Jawa Barat ini. ■ **es/sf**

## DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah

**Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring menyoroti serapan anggaran tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang masih sangat rendah. Hingga akhir Mei 2018, anggaran KLHK baru terserap sekitar 21,06 persen saja.**

“Serapan anggaran masih sangat jauh dari harapan, sebaiknya di akhir Mei harus sudah mencapai angka 40 persen,” kata Tifatul dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri LHK beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).

KLHK harus mencari pokok masalah rendahnya serapan anggaran tahun 2018. “Kalau APBN tidak dibelanjakan, maka program kerja yang telah dirancang tahun-tahun sebelumnya bisa dipertanyakan masyarakat. Dampaknya dirasakan di tahun mendatang, yaitu terjadi pengurangan terhadap anggaran kementerian itu sendiri,” ujar politisi PKS ini.

Tifatul mengimbau agar KLHK mencari solusi untuk memaksimalkan agar serapan anggaran berjalan normal hingga akhir 2018. “Kalau sudah mendekati akhir tahun, ditakutkan nanti akan ada pemborosan secara mendadak. Seperti banyak staf melakukan perjalanan dinas ke luar kota dan lainnya,” tegasnya.

Terkait akuntabilitas belanja negara, Tifatul menyarankan KLHK harus berhati-hati agar tidak terjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan aparat hukum lainnya yang kemudian dijadikan sumber masalah.

Adapun penambahan anggaran KLHK pada tahun 2019, Tifatul menyatakan setuju, asal peruntukan anggaran tersebut dijelaskan secara umum, termasuk skema-skema apa saja yang ingin dicapai dan juga persentase yang diharapkan sampai batas akhir penggunaan anggaran di 2019 kelak. ■ **es/sf**



Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring

Foto: Kresno/hr

# Komisi VIII Desak Kemenag Prioritaskan Pengangkatan Honorer Pada RAPBN 2019

**Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama memprioritaskan penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kemenag. Demikian salah satu kesimpulan raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).**



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong

Salah satu alasan yang dikemukakan Anggota Komisi VIII adalah para calon haji dari Provinsi Banten mesti masuk asrama haji di Pondok Gede di Jakarta Timur. Padahal Bandara Soekarno-Hatta lokasinya ada di Provinsi Banten, karena itu sudah saatnya Provinsi Banten memiliki asrama haji. ■ mp/sf

**D**alam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong itu, Komisi VIII juga mendesak Kemenag untuk memprioritaskan program untuk penyelesaian sertifikasi, *inpassing* serta selisih tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru dan dosen yang dialokasikan dalam usulan tambahan anggaran.

Raker yang beragendakan pembicaraan pendahuluan RAPBN Kemenag tahun 2019 ini, Komisi VIII menyetujui pagu indikatif Kemenag sebesar Rp63,042 triliun. Dari jumlah tersebut terbesar dialokasikan untuk Pendidikan Islam sebesar Rp49,525 triliun, penyelenggaraan haji dan umrah Rp1,496 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp1,986 triliun serta jaminan produk halal sebesar Rp211,416 miliar.

Di bagian lain, Komisi VIII juga mendesak Kemenag dalam penyusunan dan pengalokasian RAPBN 2019 memprioritaskan program bantuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Lembaga Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kemenag. Kemenag juga didorong untuk menjadi pemeran utama melalui Pendidikan dan bimbingan keagamaan dalam upaya pencegahan radikalisme.

Sejumlah Anggota Komisi VIII dalam raker ini mengusulkan pembangunan asrama haji di beberapa daerah yang belum memiliki asrama bagi tamu-tamu Allah yang melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Pembangunan asrama haji yang diusulkan adalah Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan beberapa provinsi lainnya.

## RAPBN 2019 Ambisius dan Banyak Tantangan

**Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2019 terlihat ambisius, sehingga ini menjadi kerja besar bagi pemerintah di tengah tantangan global yang semakin kompetitif.**

**D**ijelaskannya, pada Tahun 2019, Indonesia masih dihadapkan sejumlah tantangan. Misalnya, risiko dari perdagangan dunia, yakni proteksionisme di sejumlah negara, normalisasi kebijakan moneter di AS, dan situasi geopolitik luar negeri. "Asumsi makro ini luar biasa optimistiknya. Tapi memang

tantangan yang luar biasa juga," kata Johnny saat Raker dengan Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Ambisiusitas ini terlihat ketika Menkeu memaparkan bahwa proyeksi pertumbuhan investasi pada Tahun 2019 berada di kisaran 7,5 persen-8,3 persen. Sri Mulyani mengatakan upaya menjaga momentum pertumbuhan investasi

tersebut dengan menjaga kepercayaan investor swasta melalui kemudahan proses berusaha maupun pemberian insentif fiskal untuk mendorong pembangunan industri.

"Investasi terus akan diperkuat termasuk memberikan insentif, melakukan simplifikasi regulasi atau reformasi di bidang birokrasi dan perizinan, dan bahkan meluncurkan *single submission* yang akan segera dilakukan oleh pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam paparannya.

Diketahui, pada Kuartal I-2018, kinerja investasi telah mencatatkan pertumbuhan hingga 7,95 persen seiring dengan peningkatan belanja modal atau

# Skala Konsep Gerakan Gemar Membaca Masih Kecil

**Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa kemungkinan konsep gerakan gemar membaca yang selama ini dilakukan diberbagai tempat dan daerah di Indonesia tarafnya masih dalam skala yang kecil. Oleh karenanya ia mengusulkan agar konsep tersebut dilakukan dalam skala yang lebih besar.**

“Kalau bisa ada gerakan yang massal, sehingga mampu memberikan dampak semangat kepada masyarakat untuk membaca,” ujar Putu dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).

Menurutnya, kalau hanya berupa sosialisasi saja yang dilakukan maka akan berat untuk bisa mendongkrak literasi minat baca masyarakat. Oleh karenanya, perlu ada pemberian insentif, agar dapat menarik minat baca masyarakat.

“Saya juga mendorong diadakan festival membaca atau semacamnya sebagai langkah strategis bagi perpustakaan,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Ia memaparkan, di luar negeri ada yang namanya Presidential Library, yakni setiap Presiden yang pernah menjabat dibuatkan sebuah perpustakaan, guna memberikan daya tarik atau dukungan

merupakan pencapaian tertinggi sejak periode 2014. Peningkatan investasi ini yang menjadi salah satu penyebab tingginya impor pada awal 2018 karena adanya impor bahan baku maupun bahan modal yang dibutuhkan untuk ekspansi usaha dari sektor industri pengolahan besar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI Hafisz Tohir berharap kerangka dan asumsi ekonomi makro atau KEM PPKF bisa dijadikan landasan dalam penyusunan APBN 2019. Diharapkan juga kinerja pemerintah untuk memberikan masyarakat yang lebih baik bisa terwujud. Seperti diketahui, pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 kepada DPR.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani melaporkan bahwa tema kebijakan fiskal Tahun 2019 yaitu APBN untuk



Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana

dalam konsep agar semua pihak ingin membaca.

“Iconic branding dari para mantan Presiden kita juga bisa menarik banyak pihak untuk gemar membaca. Konsep

ini bisa disebar diseluruh Indonesia, dan perpustakaan itu nantinya menjadi ikon duta utama dalam gerakan gemar membaca. Ini bisa menjadi langkah strategis dan politis untuk membangun gerakan membaca, sekaligus sebagai bentuk penghargaan terbesar bagi para pemimpin bangsa,” tutur politisi dapil Bali itu.

Sementara itu Kepala Perpustakaan M. Syarif Bando dalam paparannya menyampaikan, arah kebijakan perpustakaan tahun 2019 diantaranya, pertama, mengembangkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, melalui pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa; peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; pendampingan masyarakat untuk literasi informasi.

Kedua, arah kebijakan perpustakaan tahun 2019 lainnya adalah meningkatkan budaya gemar membaca melalui peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi daerah; peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.

Dan ketiga, yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik, serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno, melalui konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno; dan pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno. ■ dep/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate

mendorong investasi dan daya saing. Pemerintah menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditetapkan 5,4-5,8 persen. Sementara inflasi diperkirakan 2,5-4,5 persen, dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 4,6-5,2 persen.

Kemudian, nilai tukar di kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS, harga minyak mentah 60-70 dolar AS per barel, Lifting minyak 722-805 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,21-1,30 juta barel setara minyak. ■ hs/sc



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana bersama Pimpinan DPR RI, Anggota BAKN dan BPK RI

Foto: Jayadi/hr

## Kemenristekdikti Diminta Lakukan Monitoring Paham Radikalisme di Lingkungan Kampus

**Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana tak memungkiri, pemikiran atau paham radikalisme ada di setiap kampus dan lingkungan masyarakat. Bahkan, di lingkungan keluarga, pemikiran radikalisme itu pasti ada. Namun yang lebih penting adalah bagaimana agar intensitas pemikiran radikalisme itu tidak menjadi tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pun harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap paham radikalisme di lingkungan kampus.**

“Evaluasi dan monitoring oleh Kemenristekdikti ini dalam konteks menjaga bangsa dan negara ini dari situasi kekacauan terorisme. Saya kira wajar, dimanapun pasti ada orang-orang yang berpikir radikal. Tapi kemudian tentu

ini tidak boleh dibiarkan menjadi benih-benih pembangkangan terhadap negara,” kata Dadang, di sela-sela pertemuan Pimpinan DPR RI dan BAKN dengan BPK RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Politisi Partai Hanura itu menambahkan, paham radikalisme itu tumbuh ketika keinginan dan cita-cita politiknya tidak tersampaikan dengan baik, maka oknum-oknum itu akan mencari jalan yang keras, mengintimidasi, bahkan melakukan teror. Menurutnya, ketika seseorang yang tidak menghormati merah putih dan tidak mengakui Pancasila, itu sudah jelas melakukan pembangkangan dan mulai muncul benih-benih radikalisme.

“Jika paham radikalisme itu sudah masuk dunia kampus atau kecendekiawanan, itu sangat berbahaya. Karena orang-orang kampus dan cendekiawan itu adalah matahari masyarakat, yang artinya menjadi rujukan bagi masyarakat, dan memberikan pengaruh bagi masyarakat. Ini berbahaya

jika dibiarkan. Mahasiswa harus lebih bertanggungjawab, karena mereka termasuk masyarakat terdidik,” tandas Dadang.

Namun ia yakin, kampus memiliki sistem untuk meminimalisir paham dan aliran radikalisme di lingkungan kampus. Menurutnya, untuk menghadapi kaum intelektual dan cendekiawan dapat dilakukan dengan pendekatan akademis, elegan dan konstruktif. Wakil rektor bidang kemahasiswaan, dosen atau organisasi intra kampus bisa berperan dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat kampus, melalui diskusi yang sehat.

“Dunia kampus, intelektual, dan cendekiawan itu yang dikembangkan adalah diskursus yang konstruktif dan sehat. Saya kira kita punya akal sehat bersama, atau sebuah *common sense* bahwa yang namanya radikalisme itu kesesatan dan penyimpangan dari nalar yang sehat. Paham radikalisme itu sebetulnya hidup, tapi tidak akan tumbuh subur, ketika dihadapkan pada cara berpikir yang baik,” analisa Dadang.

**Kampus memiliki sistem untuk meminimalisir paham dan aliran radikalisme di lingkungan kampus. Menurutnya, untuk menghadapi kaum intelektual dan cendekiawan dapat dilakukan dengan pendekatan akademis, elegan dan konstruktif**

Di sisi lain, mengenai data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengungkap tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar terorisme, Dadang menilai BNPT jangan terlalu membuka data itu. Menurutnya, hal itu cukup menjadi bagian dari strategi BNPT dalam mengawasi pergerakan paham radikalisme di lingkungan kampus. Hal itu jangan sampai menimbulkan keresahan dan stigma negatif dari masyarakat kepada kampus.

“Artinya monitoring dilakukan, tapi jangan terlalu reaktif. Aktivitas kampus juga biasa saja, tidak perlu terlalu dimata-matai. Kita tidak mungkin menghilangkan secara total orang-orang yang berpikir radikal, tapi kita harus tetap meminimalisir, dan mengunci, agar tidak menjadi aksi. Karena yang paling berbahaya dari pemikiran radikalisme adalah ketika sudah menjadi aksi,” tutup politisi dapil Jawa Barat itu. ■ sf

## RUU Konsultan Pajak Untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak Negara

**Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menjelaskan tujuan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Konsultan Pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu, yang juga menjadi unsur penting dari RUU ini adalah memberikan edukasi dan informasi kepada para wajib pajak. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin rapat dalam pengharmonisasian RUU Tentang Konsultan Pajak.**

Intinya adalah dengan adanya undang-undang konsultan pajak maka kita berharap tingkat penerimaan pajak atau *tax ratio* dari negara kita akan meningkat, itu tujuannya. Saya kira kalau tujuan itu bisa tercapai ini layak diteruskan. Tapi kalau dari hasil kajian pengaruhnya tidak signifikan, ya itu patut dipertimbangkan diteruskan atau tidak,” jelas Totok di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, baik itu badan hukum ataupun perorangan. Oleh sebab itu, dalam menunaikan kewajiban dari negara dibutuhkan edukasi dan informasi tentang perpajakan. Totok mengatakan, UU ini harus memberikan aturan yang menyeluruh dan sekaligus untuk mengingatkan kembali kepada pemerintah bahwa fungsi edukasi terhadap masyarakat tentang kemudahan pelayanan di bidang perpajakan.

“Kemudian juga bagaimana cara mengisi, menghitung memenuhi kewajiban pajak itu salah satu tugas pokok dari pemerintah yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus ditingkatkan, supaya tingkat penerimaan pajak kita menjadi lebih baik,” ungkap politisi PAN itu.

Selain itu, yang juga menjadi pembahasan serius dari RUU ini adalah,



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto

Foto: Jaka/hr

apakah profesi konsultan pajak nantinya bersifat terbuka atau tertutup. Kalau tertutup berarti tidak boleh ada pihak lain yang melakukan fungsi konsultasi pajak selain yang sudah diatur dalam UU ini. “Tapi kalau itu bersifat terbuka berarti boleh dilakukan oleh siapa pun, cuma untuk hal-hal tertentu mungkin perlu dilakukan oleh lembaga atau orang yang diatur oleh UU,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, pada dasarnya konsultasi pajak itu menjadi profesi yang terbuka kalau ini pandangan terbuka, dan yang melakukan proses secara teknis urusan pajak adalah wajib pajak dengan pemerintah jadi konsultan sifatnya membantu. Namun kalau tertutup konsultan bisa memiliki peranan lebih di depan untuk urusan-urusan perpajakan.

■ eko/sf



Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sarifuddin Sudding

Foto: Chasbi/hr

## Tugas MKD Tak Lepas Dari Peran Institusi Penegak Hukum

**Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan bahwa tugas tidak terlepas dari peran institusi penegak hukum yang ada. Perkara-perkara yang ditangani oleh MKD selalu berkaitan dengan institusi Kepolisian maupun Kejaksaan.**

“Sinergi dan kerja sama antara MKD dengan institusi penegak hukum perlu dibangun, guna mendapatkan data dan informasi terhadap dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anggota Dewan,” ucap Sudding saat memimpin Kunjungan Kerja MKD ke Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (7/6).

Politisi Partai Hanura itu menjelaskan bahwa tujuan Kunjungan Kerja MKD

ke Sumsel adalah dalam rangka untuk membangun sinergi dan kerja sama antara MKD dengan institusi penegakan hukum, dalam hal ini yaitu Polda dan Kejaksaan Tinggi yang ada di Sumatera Selatan.

Dikatakannya, ada beberapa hal di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, seperti yang menyangkut masalah izin setelah

mendapatkan pertimbangan dari Presiden, dan beberapa aturan turunan tentang kehormatan Dewan.

“Masalah merendahkan harkat dan martabat kedewanaan itu memerlukan penjelasan lebih lanjut, begitu juga dengan masalah penggeledahan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Saya kira semua masukan-masukan yang diberikan oleh pihak Polda maupun Kejaksaan Tinggi Sumsel sangat berarti buat MKD,” ujarnya.

Sudding juga menyampaikan, kerja sama dengan institusi penegak hukum diperlukan untuk membantu penanganan kasus pelanggaran etika yang ditangani oleh MKD. Kerja sama ini juga untuk memperoleh data dan informasi dari institusi penegakan hukum, terutama dalam masalah pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anggota Dewan.

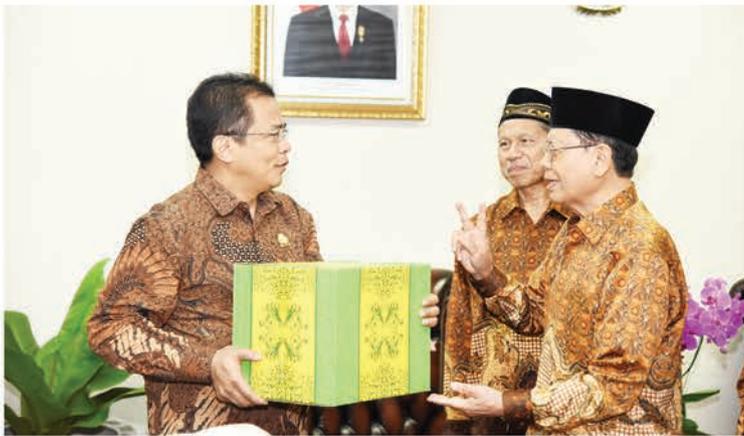
“Banyak laporan-laporan yang masuk ke MKD yang sudah ditangani oleh institusi penegakan hukum,” ungkap politisi dapil Sulawesi Tengah itu. ■ as/sf



Ketua DPR Bambang Soesatyo meninjau persiapan PT Telkom terkait kesiapan jaringan telekomunikasi untuk menunjang akses publik pada Hari Raya Idul Fitri, Jum'at (8/6). Foto: Jaka



Wakil Ketua DPR Utut Adianto menerima Duta Besar Korsel untuk Indonesia Chang-Boem Kim di Gedung DPR RI, Kamis (7/6). Foto: Eno



Belom ada caption



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Mau motor  
Zaman now?

IKUTI LOMBA  
KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY  
MEME (gambar, karikatur, video)  
ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:  
19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018  
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now  
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,  
Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE: SAAT PENGUMUMAN  
DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY

- [lombakritikterbaikDPR@gmail.com](mailto:lombakritikterbaikDPR@gmail.com)
- [lombakritikterbaikDPR@yahoo.com](mailto:lombakritikterbaikDPR@yahoo.com)
- [@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)
- [@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)
- [@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)